



PENGUMUMAN

Nomor : 3/PN.01.02

Tentang

Pengadaan Jasa Konsultansi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2024

Berdasarkan Surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Pemerintahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor : 07/BIDPEM/09/01/24 Tanggal 9 Januari 2024 perihal Permohonan Proses Pengadaan Barang/Jasa, dengan ini diberikan kesempatan kepada Warga Negara Indonesia (WNI) untuk mengikuti seleksi dengan formasi kebutuhan Tenaga Ahli:

- a. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) sebanyak 1 (satu) orang

I. PERSYARATAN KUALIFIKASI ADMINISTRASI/LEGALITAS MELIPUTI:

- a. Surat Lamaran yang ditujukan kepada Pejabat Pengadaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- b. Surat Pernyataan Pakta Integritas;
- c. Formulir Isian Kualifikasi;
- d. Foto Copy Identitas Kewarganegaraan Indonesia seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor/Surat Keterangan Domisili Tinggal;
- e. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- f. Surat pernyataan yang ditandatangani Peserta yang berisi:
 1. Tidak dikenakan Sanksi Daftar Hitam;
 2. Keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait;
 3. Tidak dalam pengawasan pengadilan dan/atau sedang menjalani sanksi pidana; dan

4. Tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti di luar tanggungan Negara.
 5. Bersedia ditempatkan di Wilayah Provinsi DKI Jakarta;
 6. Tidak menuntut apabila anggaran tidak tersedia dan terdapat perubahan anggaran dalam DPA-Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2024 atau proses pengadaan langsung dibatalkan;
 7. Tidak Menuntut untuk diangkat sebagai CPNS dan/atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK); dan
 8. Menjaga seluruh data dan informasi yang diberikan oleh Pemprov DKI dan tidak boleh dipergunakan untuk keperluan apapun tanpa persetujuan tertulis Bappeda Provinsi DKI Jakarta.
- g. Foto Copy Ijazah yang sesuai dengan syarat kualifikasi;
 - h. Foto berwarna ukuran 4x6;
 - i. Daftar Riwayat Hidup/Curriculum Vitae (CV);
 - j. Contoh portofolio/*policy brief/policy paper* yang pernah disusun.

II. PERSYARATAN KUALIFIKASI TEKNIS MELIPUTI:

- a. Berlatar belakang pendidikan minimal sarjana (S1) pada jurusan/ program studi Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Ekonomi Pembangunan, Perencanaan Wilayah dan Kota, atau bidang lain yang relevan;
- b. Memiliki pengalaman bekerja minimal 3 (Tiga) tahun di Instansi Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Lembaga Nasional atau Instansi lainnya;
- c. Mempunyai pengalaman dalam membuat analisa kebijakan di Bidang Pemerintahan terkait Perencanaan dan Pembangunan;
- d. Mempunyai pengalaman dalam penyusunan dokumen perencanaan Pemerintah Daerah dan/atau *policy brief/policy paper*;
- e. Mempunyai pengalaman dalam analisa lintas sektor;
- f. Mahir dalam pengolahan dan penyajian data menggunakan microsoft excel/tableau/microsoft power point/canva atau aplikasi sejenis lainnya;
- g. Mahir dalam berbahasa inggris;
- h. Tidak dalam ikatan kontrak kerja/jasa konsultasi dengan instansi lain (Pemerintah, Swasta dan Lembaga lainnya)

III. TATA CARA PENDAFTARAN

Pendaftaran dapat dilakukan dengan mengirimkan data lamaran sesuai dengan Persyaratan Administrasi/Kualifikasi ke email bappedappbj@gmail.com cc: bidang.pemerintahan1@bapedadki.net dengan subjek "**Formasi Tenaga Ahli yang Dilamar – Nama**" mulai tanggal 12 – 17 Januari 2024.

IV. JADWAL SELEKSI

Seluruh tahapan seleksi akan dilakukan di Jakarta, penjadwalan untuk seluruh tahapan seleksi adalah sebagai berikut:

1.	Pengumuman Pengadaan	12 Januari 2024
2.	Pendaftaran	12 - 17 Januari 2024
3.	Seleksi Administrasi	18 Januari 2024
4.	Pengumuman Seleksi Administrasi	19 Januari 2024
5.	Seleksi Tertulis dan Interview	22 - 23 Januari 2024
6.	Pengumuman Seleksi Tertulis dan Teknis	24 Januari 2024

V. LAIN-LAIN

1. Pelamar yang dinyatakan lulus setiap tahapan seleksi, maka berhak mengikuti tahapan seleksi selanjutnya;
2. Bagi Pelamar yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan Gugur;
3. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir diketahui terdapat keterangan Pelamar yang tidak sesuai/tidak benar, maka Pejabat Pengadaan dan Tim Teknis Seleksi dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan;
4. Keputusan Pejabat Pengadaan dan Tim Teknis Seleksi tidak dapat diganggu gugat.

Jakarta, 12 Januari 2024
Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta



Ahnafian Hafidh
NIP 199611022019031007

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
No. Identitas :
Alamat :
Pekerjaan :

Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dalam rangka pengadaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan Belanja Jasa **Tenaga Ahli** pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta pada dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Akan melaporkan kepada PA/KPAJAPIP jika mengetahui terjadinya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam proses pengadaan ini;
3. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam angka 1, 2, dan 3 maka bersedia dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Jakarta,

Nama

FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
No. Identitas :
Alamat :
Telepon/Fax :
Email :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Saya secara hukum mempunyai kapasitas untuk menandatangani Kontrak;
2. Saya bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah;
3. Saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;
4. Saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan pihak lain yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;
5. Saya tidak sedang dikenakan sanksi Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengaduan, tidak pailit atau kegiatan usahanya sedang dihentikan;
6. Data-Data yang saya sampaikan adalah sebagai berikut:

A. Data Administrasi

- 1 Nama :
- 2 Pekerjaan :
- 3 Alamat Rumah :

- No. Telepon :
- 4 Alamat Kantor :

- No. Telepon :
- 5 Email :
- 6 Nomor Identitas :

B. Data Pekerjaan yang Sedang Dilaksanakan
(contoh)

No	Nama Paket Pekerjaan	Ringkasan Lingkup Pekerjaan	Lokasi	Pemberi Pekerjaan		Status Penyedia dalam Pelaksanaan Pekerjaan	Kontrak		Progres Terakhir	
				Nama	Alamat; Telepon		Nomor; Tanggal	Nilai	Kontrak (Rencana)	Prestasi Kerja (%)
1	Tenaga Ahli Data Entry Pengelolaan Kearsipan	Mengelola Arsip Dinamis Bappeda Provinsi DKI Jakarta yang terdiri dari arsip aktif, arsip inaktif, dan arsip vital secara efisien, efektif, dan sistematis. Adapun ruang lingkup pengelolaan arsip dinamis Bappeda yang akan dikerjakan meliputi pemeliharaan, serta penyusutan arsip.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta	Jalan Medan Merdeka Selatan No 8-9, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10110; 021-3822261	Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta	12/-077.922; 04 Januari 2021	Rp. 69.720.000,-	12/-077.922	80%

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya bersedia dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Jakarta,

Materai

Nama

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIK :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya:

1. Tidak dikenakan Sanksi Daftar Hitam;
2. Keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait;
3. Tidak dalam pengawasan pengadilan dan/atau sedang menjalani sanksi pidana; dan
4. Tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti di luar tanggungan Negara.
5. Bersedia ditempatkan di Wilayah Provinsi DKI Jakarta;
6. Tidak menuntut apabila anggaran tidak tersedia dan terdapat perubahan anggaran dalam DPA-Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2024 atau proses pengadaan langsung dibatalkan;
7. Tidak Menuntut untuk diangkat sebagai CPNS dan/atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK); dan
8. Menjaga seluruh data dan informasi yang diberikan oleh Pemprov DKI dan tidak boleh dipergunakan untuk keperluan apapun tanpa persetujuan tertulis Bappeda Provinsi DKI Jakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya bersedia dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Jakarta,

Materai

Nama

